

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Aspek yang paling signifikan dari manajemen pemerintahan adalah birokrasi. Posisi birokrasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat membuat birokrasi sebagai pilar utama dalam pelayanan masyarakat (Alamsyah, 2017). Namun, posisi krusial birokrasi tersebut tidak diimbangi dengan kinerja yang baik oleh penyelenggara negara yang masih terkungkung oleh mentalitas dan pola pikir yang ketinggalan zaman. Oleh karena itu, dengan melihat kondisi tersebut, pemerintah memutuskan untuk memulai proses yang disebut dengan reformasi birokrasi (Hayat, 2014).

Generasi milenial atau yang sering disebut dengan generasi IT merupakan generasi yang paham tentang kemajuan teknologi. Melalui IT Minded generasi muda diharapkan dapat membantu memperbaiki berbagai permasalahan pelayanan, terutama yang masih pelik, seperti peningkatan standar yang lebih efisien dan serba online (Smallwood, 2019). Salah satunya dengan menerapkan sistem e-government yang lebih transparan dan terintegrasi yang

dilakukan melalui pelayanan yang lebih gesit, serta pelayanan yang dapat diperoleh secara real time oleh masyarakat dan tidak memerlukan pengeluaran operasional yang mahal, yang nantinya dapat digunakan untuk pembiayaan tersebut yang lebih penting (Pasolong, 2021).

Generasi muda dicirikan dengan metode kerja yang serba digital dan berbasis teknologi, yang memberi mereka perspektif praktis dalam bekerja (Ferdian et al., 2021). Generasi muda sangat menyadari kemajuan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas kerjanya. Selanjutnya, generasi muda dikaitkan dengan kemandirian dan tidak suka terlalu diatur. Menurut gaya berpikirnya, anak muda cenderung menghindari pekerjaan yang memerlukan metode pemecahan masalah yang kompleks (Purnamasari et al., 2020).

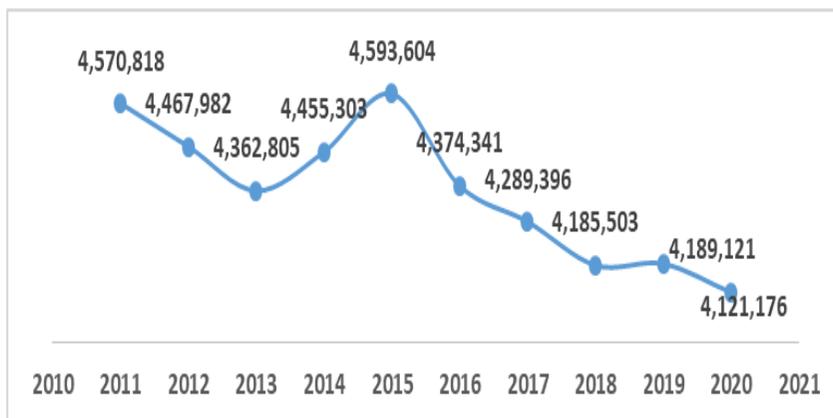
Birokrasi di Indonesia sedang dalam proses melakukan inovasi dalam memberikan pelayanan publik. Hal ini ditandai dengan dirilisnya 8 poin perubahan birokrasi dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah yang pada dasarnya saling berkaitan antara relasi manusia dan sistem (Barniat, 2019). Delapan poin tersebut yaitu manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan pengawasan (Dunan & Mudjiyanto, 2020).

Kehadiran kepemimpinan birokrasi yang kompeten merupakan salah satu aspek penunjang kinerja birokrasi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana pelayanan publik. Kepemimpinan dalam birokrasi merupakan sesuatu yang akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu birokrasi (Awang Anwaruddin, 2006). Karena pemimpin bertugas mengintegrasikan dan mengatur sumber daya birokrasi agar dapat berfungsi sebagai satu kesatuan yang utuh dan selaras satu sama lain (Yunas, 2016).

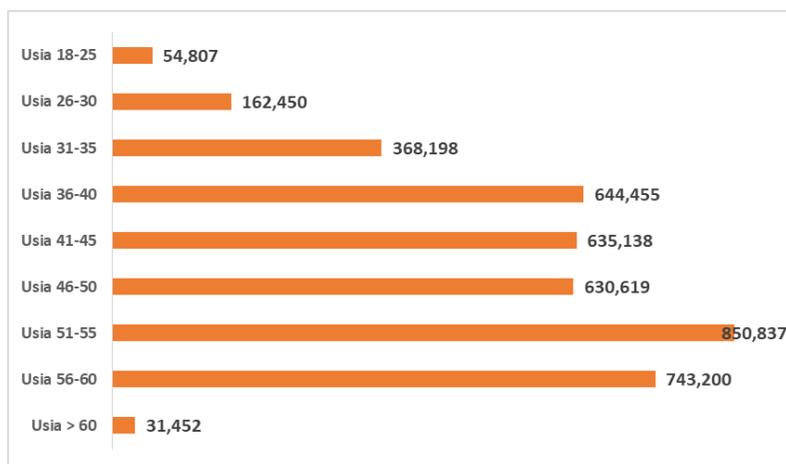
Secara eksplisit, birokrasi adalah suatu sistem atau kendali dalam suatu organisasi yang didasarkan pada norma-norma yang

sistematis dan rasional dengan tujuan mengarahkan dan mengkoordinasikan aktivitas individu dalam menjalankan fungsi administrasi secara besar-besaran (Setyadi, 2019). Birokrasi sangat penting dalam masyarakat modern karena secara logis mendukung semua tindakan negara dan menjalankan tugas-tugas negara di bidang pelayanan publik (Huda, 2020). Dalam masyarakat modern saat ini, birokrasi sebagai suatu organisasi memegang peranan penting dalam kegiatan administrasi negara. Menurut statistik BKN, jumlah birokrat Indonesia pada Juni 2020 sebanyak 4.121.176 (Ferdian et al., 2021). Setiap tahunnya, jumlah birokrat di Indonesia mengalami penurunan. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 1 berikut.



**Gambar 1.** Jumlah Birokrat di Indonesia (Sumber Data BKN 2020)

Menurut data statistik BKN per Juni 2020, birokrasi merupakan suatu sistem atau pembagian tugas pokok dan fungsi. Termasuk dalam hal ini adalah pembagian jumlah birokrat dengan persentase 77% birokrat di pemerintah daerah dan 23% birokrat di pemerintah pusat. Menurut data statistik, kelompok usia 51-55 adalah yang paling mendominasi. Gambar di bawah ini menggambarkan perbandingan ASN berdasarkan pengelompokan usia di Indonesia.



**Gambar 2.** Perbandingan ASN Di Indonesia berdasarkan Kelompok Usia  
(Sumber Data BKN 2020)

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas birokrat di Indonesia saat ini berusia antara 51 dan 55 tahun, diikuti oleh mereka yang berusia antara 56 dan 60 tahun.

Berdasarkan data pada grafik di atas, mayoritas ASN di Indonesia berusia di atas 40 tahun. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi generasi muda birokrat ke depan untuk memberikan terobosan-terobosan baru dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dalam jumlah terbatas.

Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2018, jumlah milenial di Indonesia mencapai sekitar 88 juta individu, atau 33,75% dari keseluruhan populasi. Dalam hal ini, peningkatan ketersediaan sumber daya masyarakat usia produktif seharusnya berdampak baik bagi pembangunan dan masa depan Indonesia (Wardani, 2019). Anak muda sangat sensitif terhadap hal-hal baru. Mereka mampu beradaptasi dengan perubahan termasuk dalam hal ini tata kelola yang selalu dinamis (Schwieger & Ladwig, 2018). Akibatnya, energi ekstra dan bakat dinamis diperlukan untuk menghadapi perubahan. Dalam situasi ini, generasi muda mengungguli generasi sebelumnya (Alamsyah, 2017). Anak-anak muda dengan kepribadian anti kemapanan, nilai-nilai luar biasa, yang inventif dan berani, dan yang dapat menjadi

antitesis birokrat dengan mentalitas feodal dan paternalistik (Naafs & White, 2012).

Studi ini tidak dirancang untuk melebih-lebihkan peran kaum muda, melainkan untuk menyelidiki opsi paling realistis untuk apa yang dapat dicapai oleh birokrat muda. Generasi muda sebagai aparatur negara diharapkan dapat menjadi landasan bagi terciptanya pemerintahan yang lebih bersih, fleksibel, dan adaptif (Cahyo Seftyono, Purwo Santoso, Muhadjir Muhammad Darwin, 2020). Di sisi lain, Indonesia diperkirakan akan memasuki fenomena bonus demografi yang ditandai dengan pertumbuhan jumlah penduduk produktif yang cukup besar, antara tahun 2030 sampai 2040 (Saaid & Wahab, 2014).

Berdasarkan fenomena tersebut penulis tertarik melakukan penelitian ini yang menganalisis program pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu program ajudan milenial atau dikenal dengan program Jabar Future Leaders yang diharapkan dapat memaksimalkan peran anak muda dalam birokrasi di Indonesia. Program ini termasuk kedalam tujuh program unggulan yang dicanangkan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Jabar Future Leaders sendiri merupakan

program pelatihan Ajudan pribadi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Inisiatif ini merupakan kerjasama antara Humas Jabar, Dinas Pemuda dan Olahraga Jabar, dan Bank Jabar Banten, dan didukung penuh oleh pihak bank (BJB). Kepemimpinan terbaik, menurut Gubernur Jawa Barat dalam akun Instagram @jabarfuturleaders, adalah memimpin dengan memberi contoh. Hal inilah yang menjadi landasan bagi terlaksananya program Future Leaders Jawa Barat sampai saat ini.

Melalui inisiatif ini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berharap keteladanannya dapat diikuti oleh para pemimpin masa depan yang akan mengemban amanah rakyat, karena kepemimpinan adalah komoditas berharga yang harus diturunkan (Gufroni & Setiawan, 2010). Hal ini sesuai dengan Road Map Reformasi Birokrasi di Indonesia, dimana birokrasi Indonesia bercita-cita menjadi birokrasi kelas dunia dengan semangat pemerintahan yang dinamis melalui generasi muda yang unggul (Naafs & White, 2012). Birokrasi Indonesia berusaha membangkitkan momentum transformasional. Presiden Jokowi beberapa kali menyampaikan pandangan dan keinginannya

terhadap banyak wajah dan isi birokrasi. Dalam hal ini birokrasi di Indonesia diperbaiki untuk membentuk birokrasi Indonesia yang responsif, gesit, dan tidak berbelit-belit (Reza, 2020).

Jabar Future Leader (JFL) atau program ajudan milenial telah berjalan selama 4 Tahun yang terlaksana pertama kali pada tahun 2019 dan dibuka secara umum bagi pemuda-pemudi seluruh yang ditugaskan sebagai ajudan untuk mendampingi keseharian Gubernur kemanapun kegiatannya. Berikut ini merupakan jumlah pendaftar Jabar Future Leaders yang berasal dari seluruh Indonesia berdasarkan data yang dikutip dari media sosial Instagram resmi, yakni @jabarfuturereaders.

**Tabel 1.** Jumlah Pendaftar Jabar Future Leaders  
(Sumber Instagram @jabarfuturereaders)

<b>Batch</b>	<b>Tahun</b>	<b>Pendaftar</b>	<b>Terpilih</b>
1	2019	539	30
2	2018	4.039	42
3	2017	11.171	22
4	2016	4.096	30
<b>Total</b>		<b>19.845</b>	<b>124</b>

Hal ini menunjukkan antusias yang sangat tinggi dari pemuda-pemudi yang ingin menjadi ajudan milenial Gubernur Jawa Barat. Program ini rutin dipublikasikan oleh Humas Jabar

melalui akun media sosial resmi Jabar Future Leaders seperti Instagram, Twitter, dan Youtube. Media-media itu memiliki jumlah pengikut yang cukup banyak, contohnya media sosial Instagram yang telah diikuti oleh lebih dari 33.000 orang (followers) per tanggal 09 Maret 2022.

Menurut Instagram @jabarfutureleaders, peran ajudan ini adalah untuk mengikuti dan menjamin agenda kegiatan pimpinan lancar dan kondusif, menyiapkan kebutuhan pimpinan, serta menyalurkan informasi dan pengalaman yang didapat sebagai ajudan milenial. Sedangkan manfaat dari program ini antara lain dapat mengamati dan mempelajari kepemimpinan secara langsung di lapangan, mengenal sistem birokrasi dan administrasi pemerintahan, mendapatkan pelatihan kepemimpinan dari tokoh-tokoh yang berpengalaman, dan menjalin pertemanan atau relasi di lingkungan baru (Gufroni & Setiawan, 2010).

Ajudan membantu pemimpin dengan tugas-tugas yang berhubungan dengan protokol baik di dalam maupun di luar, seperti merencanakan semua jenis kunjungan tamu dan protokol untuk acara resmi atau seremonial (Naafs & White, 2012). Akibatnya,

ajudan harus memahami beberapa kemampuan dasar, seperti keterampilan protokol, atau dapat memberikan gambaran umum tentang suatu masalah dari sudut pandang protokol, menyiratkan bahwa ajudan harus memahami bagaimana tugas-tugas sebagai protokoler (Stewart & Brown, 2019). Selain itu, ajudan juga harus memiliki komunikasi yang kuat dan keterampilan manajemen waktu yang baik. Berbagai keterampilan khusus dan kemampuan khusus diperlukan untuk pengoperasian agenda kepemimpinan yang efisien, oleh karena itu kehadiran seorang ajudan menjadi sangat penting (Canton, 2019).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana efektivitas program ajudan milenial (Jabar Future Leaders) dalam menciptakan generasi muda yang unggul. Tujuan dari program ini adalah memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk bekerja sebagai ajudan Gubernur Jawa Barat selama satu minggu. Pemimpin masa depan Jawa Barat seharusnya memberikan pengalaman yang signifikan kepada generasi penerus tentang realitas pemimpin lapangan. Efektivitas suatu program tidak hanya ditentukan oleh tujuan suatu organisasi atau lembaga, tetapi juga

oleh metode yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya disebut sebagai efektivitas.

Penelitian ini menggunakan Q-DAS (Qualitative Data Analysis Software) Nvivo 12 plus untuk menganalisis data. Pendekatan kualitatif memberikan eksplorasi dan deskripsi mengenai Program Ajudan Milenial (Jabar Future Leaders). Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana efektivitas Program Ajudan Milenial (Jabar Future Leaders) dalam menciptakan generasi muda unggul melalui media sosial Twitter dan Instagram. Fokus penelitian ini adalah program Jabar Future Leaders dengan melakukan tangkapan data pada semua media sosial Jabar Future Leaders. Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan substansi: Program Ajudan Milenial (Jabar Future Leaders) dalam menciptakan generasi muda unggul.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Sejauh Mana Efektivitas Program Ajudan Milenial (Jabar Future Leaders) dalam menciptakan generasi muda unggul?

2. Apakah Kendala Efektivitas Program Ajudan Milenial (Jabar Future Leaders) dalam menciptakan generasi muda unggul?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu:

- a) Untuk menjelaskan sejauh mana efektivitas program ajudan milenial (Jabar Future Leaders) dalam menciptakan generasi muda unggul.
- b) Untuk menjelaskan apakah kendala efektivitas program ajudan milenial (Jabar Future Leaders) dalam menciptakan generasi muda unggul.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teori, temuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengubah pemahaman dan pengetahuan, khususnya bagi penulis, dan penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

Dan sesuai dengan ilmu yang ditelaah, penelitian tersebut dapat bermanfaat dalam ilmu pemerintahan.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian yang dilakukan penulis ini diharapkan dapat digunakan dimasa yang akan datang sebagai sumbangan saran dan masukan, khususnya bagi pemerintah dalam mensukseskan Program Ajudan Milenial (Jabar Future Leaders) dalam membangun generasi muda yang unggul. Temuan penelitian ini semoga bermanfaat bagi pemerintah, civitas akademika, dan seluruh masyarakat Indonesia.